



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5), Pasal 96 Ayat (5) dan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana desa kepada desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI :

SEKDA :

ASISTEN I :

ASISTEN II :

INSPEKTUR :

KEPALA DPPKAD :

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang² Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014³
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah⁴ sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.

BAB II

Alokasi Dana Desa (ADD)

Bagian Kesatu

Sumber Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 2

Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 3

(1) Rumus perhitungan ADD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Pagu ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

Pagu ADD = Pagu Alokasi dana desa suatu kabupaten

Dana Perimbangan = Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten

DAK = Dana alokasi khusus

(2) Alokasi dana desa dialokasikan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar sebesar 90%.

b. Alokasi Formula 10% yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa sesuai rumus sebagai berikut :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 4

(1) Penghasilan tetap dan Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(2) Dana ADD untuk penghasilan tetap (SiTap) Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus

- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta⁶ rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. besaran penghasilan tetap kepala desa ditetapkan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa bukan PNS paling sedikit adalah 70 % dari penghasilan tetap kepala desa;
 - c. besaran penghasilan tetap Kepala Urusan paling sedikit adalah 50 % dari penghasilan tetap kepala desa;
 - d. besaran penghasilan tetap kepala dusun paling sedikit adalah 50 % dari penghasilan tetap kepala desa.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan Dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Bulan adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp. 2.000.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 1.400.000
 - c. Kepala Seksi Rp. 1.000.000
 - d. Kepala Urusan Rp. 1.000.000
 - e. Kepala Dusun Rp. 1.000.000
- (2) Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa tidak berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.

- (3) Bagi Kepala Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada⁷ ayat (2) berhak menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 7

Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa setiap Tahun Anggaran.

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diberikan setiap Bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp. 750.000
 - b. Sekretaris Desa Rp. 400.000
 - c. Kepala Seksi Rp. 200.000
 - d. Kepala Urusan Rp. 200.000
 - e. Kepala Dusun Rp. 200.000
- (2) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dalam pasal 5 diberikan setiap Bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua Rp. 400.000
 - b. Anggota Rp. 300.000

BAB V
PERENCANAAN PEMANFAATAN, PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA
Pasal 9

- (1) Sumber Pendapatan Desa Berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :
- a. 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan
 - b. 10% (Sepuluh Persen) dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- (2) Pemanfaatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. Operasional Pemerintahan Desa, Lembaga Desa Lainnya; dan
 - c. Pemberdayaan dan Pembangunan Desa.
- (3) Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang

Pasal 10

- (1) Mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan ADD, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) petunjuk teknis tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Jumlah anggaran ADD bagi masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA BPMPEMDes:	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 15 Januari 2016
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,


NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 15 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 Januari 2016
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa ;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2A ayat (2) dan ayat (4), pasal 18 ayat (5) dan ayat

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016);
- h. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016.

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Pendapatan Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa.

B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa.

4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

V. PENGALOKASIAN ADD:

1. ADD

- a. ADD dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango.
- b. Jumlah ADD yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa dan BPD, Operasional Pemerintahan Desa BPD, Operasional Lembaga Desa Lainnya dan Pemberdayaan Pembangunan.
- c. Operasional Lembaga Desa Lainnya diperuntukan sebagai berikut :
 - (1). Motifator Desa
 - (2). LPM
 - (3). PKK
 - (4). BPD
- d. Operasional Lembaga Desa Lainnya dapat diperuntukan untuk mendanai Lembaga Lainnya sesuai kebutuhan desa, jumlah Operasionalnya mengacu pada tahun sebelumnya seperti: imam mesjid, guru ngaji, pegawai syara, ppkbd, sub ppkbd, dll.

VI. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati Bone Bolango selaku Pembina
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum
 - f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
 - g. Kepala Bappeda Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - i. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- j. Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
- k. Kepala bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.
- l. Kepala bidang Kelembagaan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.
- m. Kepala bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota

Tugas dan fungsi:

- a. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai prosentase alokasi.
 - b. menyusun besaran ADD sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
 - c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan ADD;
 - e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
 - f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang.
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD.
2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Camat selaku Koordinator Kecamatan;
 - b. Kepala Seksi
 - c. Unsur terkait selaku anggota.

Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan :

- a. memfasilitasi perencanaan ADD dengan Kepada Desa;
 - b. memverifikasi rencana penggunaan dana ADD;
 - c. memverifikasi permohonan pencairan dana ADD;
 - d. monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD kepada pemerintah Desa;
 - e. menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pengelolaan ADD kepada pemerintah Desa.
3. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PTPKD)

Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi/Kepala Urusan;
- c. Bendahara;

Tugas dan Fungsi :

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :
 - 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- b. Kepala Seksi/Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas
 - 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - 3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

B. Pengelolaan ADD.

1. Sasaran Penggunaan ADD

- a. Penggunaan ADD di dimanfaatkan sebagai berikut :

1) Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

2) Biaya Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan PPP

- 4) operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Pembangunan, dipergunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a) Biaya rapat dan atau musyawarah di Desa;
 - b) Alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
 - c) Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Pemerintah Desa dan Lembaga Desa;
 - d) Biaya penyediaan data Desa, antara lain penyusunan profil Desa;
 - e) Biaya rekening listrik dan air;
 - f) Biaya pengadaan pakaian dinas aparat Desa;
 - g) Biaya Jasa media informasi Desa
 - h) Biaya pengadaan perlengkapan kantor desa.
 - i) Biaya Peningkatan Sumber Daya Aparat Pemerintah Desa;
 - j) Biaya pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat.
 - k) Biaya Keikutsertaan Program Asuransi
 - l) Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
 - m) biaya operasional pemerintahan Desa lainnya.
- b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sarana dan prasarana Desa. Kegiatan dimaksud antara lain :
 - a) pembangunan/perbaikan Kantor Desa;
 - b) biaya untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional pemerintah desa
 - c) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah Desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa.

2. Tahap Persiapan

- a. ADD dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- b. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan Keputusan Kepala Desa.

- d. PTPKD mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes.
 - e. RPD dimaksud disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes.
 - f. Hasil verifikasi dibuatkan berita acara oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi.
 - g. Verifikasi tersebut meliputi :
 1. RPJMDes dan RKPDes
 2. Rancangan APBDes
 3. Perdes APBDes
 4. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 6. Berita Acara Musyawarah Desa
 - h. Atas hasil verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan tersebut, Camat menerbitkan rekomendasi yang sampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - i. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Camat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan surat permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS serta lampirannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) guna proses pencairan ADD.
3. Tahap Penyaluran/Pencairan ADD.
- a. Penyaluran dana ADD dilakukan setiap Triwulan dengan besaran dana seper empat (1/4) dari total anggaran ADD bagi masing-masing Desa.
 - b. DPPKAD melakukan Transfer dana ADD ke rekening Desa selambat-lambatnya akhir bulan maret untuk Triwulan Pertama setelah Kepala BPM dan Pemdes menyampaikan Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS yang didukung dengan Rekomendasi Camat dan disertai Lampiran data/dokumen berupa Foto Copy Buku Rekening Bank, KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - c. pencairan Triwulan berikutnya dilakukan Apabila Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Triwulan sebelumnya Telah mencapai 80%

- d. Pencairan dana dari masing-masing rekening Desa pada Bank yang ditunjuk dilakukan oleh Bendahara Desa dengan bukti slip penarikan dana yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa.

C. Pengelolaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Lembaga Lainnya, Pemberdayaan dan Pembangunan.

1) Sasaran Penggunaan

(terlampir)

2) Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.

a. Bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

a. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.

3) Satuan Kerja Pengelola

Pengelolaan ADD dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu :

a. Pengelolaan

- 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD;
- 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD.

b. Penggunaan

- 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.




VIII. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan ADD yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan ADD tahun berikutnya;
2. bagi Desa yang penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian ADD tahun berikutnya;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

IX. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Desa Tahun 2016

KABUPATEN	DESA	URAIAN					TOTAL ADD
		SILTAP	TUNJANGAN	OPS. LEMBAGA LAINNYA	OPERASIONAL PEM DESA & PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN		
KABUPATEN	Desa Huliudotamo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	99,097,000	312,697,000	
	Desa Bube	96,000,000	65,400,000	16,200,000	130,266,000	307,866,000	
	Desa Boludawa	96,000,000	103,800,000	16,200,000	130,549,000	346,549,000	
	Desa Tingkohubu	108,000,000	67,800,000	16,200,000	131,420,000	323,420,000	
	Desa Ulanda	124,800,000	72,600,000	16,200,000	110,204,000	323,804,000	
	Desa Tinelo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	116,643,000	330,243,000	
	Desa Bubeya	124,800,000	72,600,000	16,200,000	105,944,000	319,544,000	
	Desa Bube Baru	124,800,000	72,600,000	16,200,000	108,139,000	321,739,000	
	Desa Tingkohubu Timur	124,800,000	72,600,000	16,200,000	98,991,000	312,591,000	
	Desa Helimo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	98,579,000	312,179,000	
	JUMLAH	1,173,600,000	745,200,000	162,000,000	1,129,832,000	3,210,632,000	
	KABUPATEN	Desa Molintogupo	136,800,000	75,000,000	16,200,000	111,677,000	339,677,000
		Desa Libungo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	108,005,000	321,605,000
Desa Bulontala		124,800,000	72,600,000	16,200,000	107,821,000	321,421,000	
Desa Bonedaa		136,800,000	75,000,000	16,200,000	97,312,000	325,312,000	
Desa Bondawuna		96,000,000	70,200,000	16,200,000	147,209,000	329,609,000	
Desa Bufontala Timur		124,800,000	72,600,000	16,200,000	114,609,000	328,209,000	
Desa Pancuran		124,800,000	72,600,000	16,200,000	105,238,000	318,838,000	
Desa Bondaraya		124,800,000	72,600,000	16,200,000	106,401,000	320,001,000	
JUMLAH		993,600,000	583,200,000	129,600,000	898,272,000	2,604,672,000	
KABUPATEN		Desa Dumbaya Bulan	108,000,000	67,800,000	16,200,000	136,198,000	328,198,000
	Desa Tilangobula	108,000,000	67,800,000	16,200,000	133,605,000	325,605,000	
	Desa Tulabolo	108,000,000	67,800,000	16,200,000	128,270,000	320,270,000	
	Desa Tulabolo Timur	124,800,000	72,600,000	16,200,000	126,543,000	340,143,000	
	Desa Poduwoma	124,800,000	72,600,000	16,200,000	98,742,000	312,342,000	
	Desa Panggulo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	95,316,000	308,916,000	
	Desa Tulabolo Barat	124,800,000	72,600,000	16,200,000	99,855,000	313,455,000	
	Desa Pangli	124,800,000	72,600,000	16,200,000	99,416,000	313,016,000	
	Desa Tinemba	100,800,000	72,600,000	16,200,000	119,845,000	309,445,000	
	JUMLAH	1,048,800,000	639,000,000	145,800,000	1,037,790,000	2,871,390,000	

KABUPATEN	DESA	URAIAN				TOTAL ADD	
		SILTAP	TUNJANGAN	OPS. LEMBAGA LAINNYA	OPERASIONAL PEM DESA & PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN		
KABUPATEN	Desa Duano	132,000,000	72,600,000	16,200,000	109,347,000	330,147,000	
	Desa Alale	120,000,000	70,200,000	16,200,000	111,189,000	317,589,000	
	Desa Tolomato	108,000,000	67,800,000	16,200,000	114,384,000	306,384,000	
	Desa Lompotoo	120,000,000	70,200,000	16,200,000	109,474,000	315,874,000	
	Desa Lombongo	136,800,000	75,000,000	16,200,000	94,444,000	322,444,000	
	Desa Tapadaa	124,800,000	72,600,000	16,200,000	106,317,000	319,917,000	
	JUMLAH	741,500,000	428,400,000	97,200,000	645,155,000	1,912,355,000	
	KABUPATEN	Desa Dutohe	124,800,000	72,600,000	16,200,000	100,371,000	313,971,000
		Desa Tanggalinggo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	113,139,000	326,739,000
		Desa Poowid	108,000,000	67,800,000	16,200,000	131,174,000	323,174,000
		Desa Pookar Barat	124,800,000	72,600,000	16,200,000	104,480,000	318,080,000
		Desa Toto Selatan	124,800,000	72,600,000	16,200,000	109,238,000	322,838,000
Desa Talango		124,800,000	72,600,000	16,200,000	100,497,000	314,097,000	
Desa Dutohe Barat		136,800,000	75,000,000	16,200,000	97,305,000	325,305,000	
JUMLAH		868,800,000	505,800,000	113,400,000	756,204,000	2,244,204,000	
KABUPATEN		Desa Bongolme	136,800,000	108,600,000	16,200,000	72,947,000	334,547,000
		Desa Bongopini	120,000,000	70,200,000	16,200,000	126,243,000	332,643,000
		Desa Iloheluma	136,800,000	75,000,000	16,200,000	88,528,000	316,528,000
		Desa Moutong	124,800,000	72,600,000	16,200,000	106,168,000	319,768,000
	Desa Toto Utara	120,000,000	87,000,000	16,200,000	103,735,000	326,935,000	
	Desa Motilange	120,000,000	70,200,000	16,200,000	126,446,000	332,846,000	
	Desa Tamboo	136,800,000	75,000,000	16,200,000	87,742,000	315,742,000	
	Desa Lonuo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	112,577,000	326,177,000	
	Desa Tanggulo	136,800,000	75,000,000	16,200,000	104,464,000	332,464,000	
	Desa Batu	124,800,000	72,600,000	16,200,000	107,413,000	321,013,000	
	Desa Permata	136,800,000	75,000,000	16,200,000	95,301,000	323,301,000	
	Desa Tunggulo Selatan	108,000,000	67,800,000	16,200,000	118,047,000	310,047,000	
Desa Bongokulawa	136,800,000	75,000,000	16,200,000	100,142,000	328,142,000		
Desa Berlian	124,800,000	72,600,000	16,200,000	96,638,000	310,238,000		
JUMLAH	1,788,000,000	1,069,200,000	226,800,000	1,446,391,000	4,530,391,000		
KABUPATEN	Desa Talumopatu	136,800,000	75,000,000	16,200,000	91,793,000	319,793,000	
	Desa Dunggala	124,800,000	72,600,000	16,200,000	115,757,000	329,357,000	
	Desa Langge	108,000,000	67,800,000	16,200,000	140,785,000	332,785,000	
	Desa Talulobutu	124,800,000	72,600,000	16,200,000	103,564,000	317,164,000	
	Desa Talulobutu selatan	100,800,000	72,600,000	16,200,000	119,355,000	308,955,000	
	Desa Kramat	124,800,000	72,600,000	16,200,000	101,206,000	314,806,000	
JUMLAH	1,248,000,000	726,000,000	162,000,000	109,369,000	322,969,000		

KATEGORI	DESA	URAIAN					TOTAL ADD
		SILTAP	TUNJANGAN	OPS. LEMBAGA LAINNYA	OPERASIONAL PEM DESA & PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN		
	JUMLAH	844,800,000	505,800,000	113,400,000	781,829,000	2,245,829,000	
KAWILAYAH	Desa Boldu	124,800,000	72,600,000	16,200,000	102,864,000	316,464,000	
	Desa Bandungan	108,000,000	67,800,000	16,200,000	129,634,000	321,634,000	
	Desa Tupa	120,000,000	70,200,000	16,200,000	118,551,000	324,951,000	
	Desa Tulio'a	136,800,000	75,000,000	16,200,000	99,897,000	327,897,000	
	Desa Langalo	120,000,000	70,200,000	16,200,000	117,437,000	323,837,000	
	Desa Buanu	124,800,000	72,600,000	16,200,000	103,972,000	317,572,000	
	Desa Suka Damai	100,800,000	72,600,000	16,200,000	135,673,000	325,273,000	
	Desa Kopi	124,800,000	72,600,000	16,200,000	99,972,000	313,572,000	
	Desa Lomaya	120,000,000	70,200,000	16,200,000	117,240,000	323,640,000	
	JUMLAH	1,080,000,000	643,800,000	145,800,000	1,025,240,000	2,894,840,000	
	KAWILAYAH	Desa Ayula Selatan	124,800,000	72,600,000	16,200,000	105,672,000	319,272,000
Desa Ayula Utara		108,000,000	67,800,000	16,200,000	138,407,000	330,407,000	
Desa Huntu Selatan		84,000,000	67,800,000	16,200,000	160,404,000	328,404,000	
Desa Huntu Utara		100,800,000	72,600,000	16,200,000	136,241,000	325,841,000	
Desa Ayula Tilango		124,800,000	72,600,000	16,200,000	125,049,000	338,649,000	
Desa Ayula Timur		112,800,000	70,200,000	16,200,000	114,965,000	314,165,000	
Desa Lamahu		100,800,000	72,600,000	16,200,000	152,548,000	342,148,000	
Desa Huntu Barat		124,800,000	72,600,000	16,200,000	129,627,000	343,227,000	
Desa Tinelo Ayula		124,800,000	72,600,000	16,200,000	104,666,000	318,266,000	
Desa Sejahtera		124,800,000	72,600,000	16,200,000	112,831,000	326,431,000	
JUMLAH		1,130,400,000	714,000,000	162,000,000	1,280,410,000	3,286,810,000	
KAWILAYAH	Desa Monggolo	120,000,000	70,200,000	16,200,000	122,369,000	328,769,000	
	Desa Monggolo Utara	124,800,000	72,600,000	16,200,000	114,741,000	328,341,000	
	Desa Owata	124,800,000	72,600,000	16,200,000	131,174,000	344,774,000	
	Desa Pilolahaya	124,800,000	72,600,000	16,200,000	112,072,000	325,672,000	
	Desa Ilomata	124,800,000	72,600,000	16,200,000	105,909,000	319,509,000	
	Desa Suka Makmur	124,800,000	72,600,000	16,200,000	105,179,000	318,779,000	
	JUMLAH	744,000,000	433,200,000	97,200,000	691,444,000	1,965,844,000	
	Desa Timbuolo	136,800,000	75,000,000	16,200,000	85,014,000	313,014,000	
	Desa Luwuhu	108,000,000	67,800,000	16,200,000	112,291,000	304,291,000	
	Desa Buata	124,800,000	72,600,000	16,200,000	96,484,000	310,084,000	
	Desa Panggulo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	101,222,000	314,822,000	
Desa Timbuolo Timur	112,800,000	75,000,000	16,200,000	110,162,000	314,162,000		
Desa Tanah Putih	100,800,000	72,600,000	16,200,000	122,911,000	312,511,000		
Desa Panggulo Barat	124,800,000	72,600,000	16,200,000	92,164,000	305,764,000		
Desa Timbuolo Tengah	160,800,000	79,800,000	16,200,000	57,303,000	314,103,000		
Desa Sukma	124,800,000	72,600,000	16,200,000	92,958,000	306,558,000		
JUMLAH	1,118,400,000	660,600,000	145,800,000	870,509,000	2,795,309,000		

KANTON	DESA	URAIAN					TOTAL ADD
		SILTAP	TUNJANGAN	OPS. LEMBAGA LAINNYA	OPERASIONAL PEM DESA & PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN		
	Desa Huangcobatu	136,800,000	91,800,000	16,200,000	77,168,000	321,968,000	
	Desa Botubarani	124,800,000	72,600,000	16,200,000	109,035,000	322,635,000	
	Desa Biliuango	136,800,000	75,000,000	16,200,000	96,593,000	324,593,000	
	Desa Madelomo	108,000,000	67,800,000	16,200,000	140,651,000	332,651,000	
	Desa Bokutonuo	136,800,000	75,000,000	16,200,000	107,057,000	335,057,000	
	Desa Mblutabu	136,800,000	75,000,000	16,200,000	119,797,000	347,797,000	
	Desa Qluhuta	136,800,000	75,000,000	16,200,000	138,311,000	366,311,000	
	Desa Qlele	136,800,000	75,000,000	16,200,000	125,144,000	353,144,000	
	Desa Binalahe	136,800,000	75,000,000	16,200,000	94,253,000	322,253,000	
	JUMLAH	1,190,400,000	682,200,000	145,800,000	1,008,009,000	3,026,409,000	
	Desa Bilungala	156,000,000	94,200,000	16,200,000	68,128,000	334,528,000	
	Desa Biliungala Utara	124,800,000	72,600,000	16,200,000	112,963,000	326,563,000	
	Desa Tihu	120,000,000	70,200,000	16,200,000	121,130,000	327,530,000	
	Desa Tamboo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	103,186,000	316,786,000	
	Desa Tolotio	120,000,000	70,200,000	16,200,000	108,744,000	315,144,000	
	Desa Tongo	108,000,000	67,800,000	16,200,000	133,946,000	325,946,000	
	Desa Lembah Hijau	148,800,000	77,400,000	16,200,000	93,002,000	335,402,000	
	Desa Tunas Jaya	148,800,000	77,400,000	16,200,000	75,487,000	317,887,000	
	Desa Batu Hijau	124,800,000	72,600,000	16,200,000	106,156,000	319,756,000	
	Desa Kamiri	124,800,000	72,600,000	16,200,000	108,020,000	321,620,000	
	Desa Uabanga	120,000,000	70,200,000	16,200,000	128,751,000	335,151,000	
	Desa Ombulo Hijau	124,800,000	72,600,000	16,200,000	105,968,000	319,568,000	
	Desa Pelita Hijau	136,800,000	75,000,000	16,200,000	104,774,000	332,774,000	
	JUMLAH	1,682,400,000	965,400,000	210,600,000	1,370,255,000	4,228,655,000	
	Desa Kaidundu	160,800,000	79,800,000	16,200,000	60,147,000	316,947,000	
	Desa Kaidundu Barat	136,800,000	75,000,000	16,200,000	90,800,000	318,800,000	
	Desa Mopuya	136,800,000	75,000,000	16,200,000	83,366,000	311,366,000	
	Desa Mamungaa	136,800,000	75,000,000	16,200,000	87,393,000	315,393,000	
	Desa Mamungaa Timur	148,800,000	77,400,000	16,200,000	83,940,000	326,340,000	
	Desa Bukit Hijau	136,800,000	75,000,000	16,200,000	95,734,000	323,734,000	
	Pinomontiga	148,800,000	77,400,000	16,200,000	79,236,000	321,636,000	
	Dunggijata	136,800,000	75,000,000	16,200,000	86,334,000	314,334,000	
	Desa Patoa	136,800,000	75,000,000	16,200,000	87,547,000	315,547,000	
	JUMLAH	1,279,200,000	684,600,000	145,800,000	754,497,000	2,864,097,000	
	Desa Tombulilato	124,800,000	72,600,000	16,200,000	97,633,000	311,233,000	
	Desa Mootayu	108,000,000	67,800,000	16,200,000	120,704,000	312,704,000	
	Desa Inomata	108,000,000	67,800,000	16,200,000	134,514,000	326,514,000	
	Desa Mootinelo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	101,193,000	314,793,000	
	Desa Laut Biru	124,800,000	72,600,000	16,200,000	103,886,000	317,486,000	
	Desa Moopiya	124,800,000	72,600,000	16,200,000	101,649,000	315,249,000	
	Desa Alo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	109,274,000	322,874,000	
	Desa Pelita Jaya	124,800,000	72,600,000	16,200,000	112,486,000	325,086,000	

KABUPATEN	DESA	URAIAN					TOTAL ADD
		SILTAP	TUNJANGAN	OPS. LEMBAGA LAINNYA	OPERASIONAL PEM DESA & PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN		
KABUPATEN BUNGA	Desa Bunga	124,800,000	72,600,000	16,200,000	102,185,000	315,785,000	
	Desa Mootawa	124,800,000	72,600,000	16,200,000	101,337,000	314,937,000	
	JUMLAH	1,214,400,000	716,400,000	162,000,000	1,084,861,000	3,177,661,000	
	Desa Taludaa	120,000,000	70,200,000	16,200,000	131,264,000	337,664,000	
	Desa Moodulio	136,800,000	75,000,000	16,200,000	103,109,000	331,109,000	
	Desa Inogaluma	120,000,000	70,200,000	16,200,000	113,371,000	319,771,000	
	Desa Sogitisa	120,000,000	70,200,000	16,200,000	148,482,000	354,882,000	
	Desa Monano	124,800,000	72,600,000	16,200,000	108,169,000	321,769,000	
	Desa Biluzantunga	120,000,000	70,200,000	16,200,000	118,517,000	324,917,000	
	Desa Ilotuuwa	100,800,000	72,600,000	16,200,000	136,654,000	326,254,000	
	Desa Masiaga	124,800,000	72,600,000	16,200,000	104,903,000	318,503,000	
	Desa Tumbuh Mekar	124,800,000	72,600,000	16,200,000	103,090,000	316,690,000	
	Desa Molamahu	124,800,000	72,600,000	16,200,000	117,370,000	330,970,000	
Desa Muara Bone	136,800,000	75,000,000	16,200,000	88,664,000	316,664,000		
Desa Cendana Putih	124,800,000	72,600,000	16,200,000	102,667,000	316,267,000		
Desa Waluhu	124,800,000	72,600,000	16,200,000	98,556,000	312,156,000		
Permata	124,800,000	72,600,000	16,200,000	100,147,000	313,747,000		
JUMLAH	1,728,000,000	1,011,600,000	226,800,000	1,574,963,000	4,541,363,000		
KABUPATEN BULOTALANGI	Desa Bulotalangi	136,800,000	75,000,000	16,200,000	92,499,000	320,499,000	
	Desa Bulotalangi Timur	136,800,000	75,000,000	16,200,000	89,376,000	317,376,000	
	Desa Bulotalangi Barat	136,800,000	75,000,000	16,200,000	88,860,000	316,860,000	
	Desa Tokuwaya	124,800,000	72,600,000	16,200,000	97,578,000	311,178,000	
	Desa Popoatu	124,800,000	72,600,000	16,200,000	111,015,000	324,615,000	
	JUMLAH	660,000,000	370,200,000	81,000,000	479,328,000	1,590,528,000	
KABUPATEN PINOGU	Desa Pinogu	108,000,000	67,800,000	16,200,000	129,374,000	321,374,000	
	Desa Banglo	124,800,000	72,600,000	16,200,000	133,326,000	346,926,000	
	Desa Dataran Hijau	124,800,000	72,600,000	16,200,000	125,148,000	338,748,000	
	Desa Pinogu Permai	124,800,000	72,600,000	16,200,000	122,898,000	335,498,000	
	Desa Tifonggibila	124,800,000	72,600,000	16,200,000	109,270,000	322,870,000	
	JUMLAH	607,200,000	358,200,000	81,000,000	620,016,000	1,666,416,000	
TOTAL	19,893,600,000	11,716,800,000	2,592,000,000	17,455,005,000	51,657,405,000		

A	PENGHASILAN TETAP KADES DAN APARAT DESA					JUMLAH	TUNJANGAN KADES, APARAT DAN BPD								JUMLAH	MOTORATOR DESA				JUMLAH
	KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS			KADES	SEKDES	KAUR/KASI	KADUS	BPD	JUMLAH	MOTORATOR DESA	LPM		PKK	BPD			
	3	4	5	6		7	8	9	10	11	17	20	23	24	25					
engah	144,000,000	33,600,000	288,000,000	276,000,000		54,000,000	9,600,000	57,600,000	55,200,000	252,000,000	428,400,000	28,800,000	18,000,000	36,000,000	14,400,000	97,200,000				
	24,000,000		48,000,000	60,000,000		9,600,000		9,600,000	12,000,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000		48,000,000	48,000,000		9,600,000		9,600,000	9,600,000	42,000,000	70,200,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000		48,000,000	55,000,000		9,600,000		9,600,000	7,200,000	42,000,000	67,800,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000		48,000,000	48,000,000		9,600,000		9,600,000	9,600,000	42,000,000	70,200,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	75,000,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	36,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	36,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	75,000,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	336,000,000	168,000,000	672,000,000	612,000,000		126,000,000	48,000,000	134,400,000	122,400,000	638,400,000	1,068,200,000	67,200,000	42,000,000	84,000,000	33,600,000	226,800,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	70,200,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	75,000,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	75,000,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
Selain wa	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	75,000,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	36,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	67,800,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				
	24,000,000	16,800,000	48,000,000	36,000,000		9,600,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	67,800,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000				

A	PENGHASILAN TETAP KADES DAN APARAT DESA					TUNJANGAN KADES, APARAT DAN BPD						JUMLAH	MOTIFATOR DESA	LPM	PKK	BPD	JUMLAH
	KADES	SEKDES	KAUR/KAKASI	KADES	KADES	KADES	SEKDES	KAUR/KAKASI	KADUS	BPD	17						
	120,000,000	84,000,000	240,000,000	216,000,000	660,000,000	45,000,000	24,800,000	48,000,000	43,200,000	210,000,000	370,200,000	24,000,000	15,000,000	30,000,000	12,000,000	81,000,000	
i Timur	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000	136,800,000	9,000,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	75,000,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000	
i Barat	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000	136,800,000	9,000,000	4,800,000	9,600,000	9,600,000	42,000,000	75,000,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000	
3	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000	124,800,000	9,000,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000	
3	24,000,000	16,800,000	48,000,000	48,000,000	124,800,000	9,000,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000	
3	120,000,000	87,200,000	240,000,000	188,000,000	607,200,000	45,000,000	19,200,000	48,000,000	36,000,000	210,000,000	358,200,000	24,000,000	15,000,000	30,000,000	12,000,000	81,000,000	
3	24,000,000	16,800,000	48,000,000	36,000,000	108,000,000	9,000,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	67,800,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000	
3	24,000,000	16,800,000	48,000,000	36,000,000	124,800,000	9,000,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000	
3	24,000,000	16,800,000	48,000,000	36,000,000	124,800,000	9,000,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000	
3	24,000,000	16,800,000	48,000,000	36,000,000	124,800,000	9,000,000	4,800,000	9,600,000	7,200,000	42,000,000	72,600,000	4,800,000	3,000,000	6,000,000	2,400,000	16,200,000	
3	3,576,000,000	2,049,600,000	7,752,000,000	6,516,000,000	19,893,600,000	1,440,000,000	585,600,000	1,550,400,000	1,303,200,000	6,837,600,000	11,718,200,000	768,000,000	480,000,000	960,000,000	384,000,000	2,592,000,000	

A	Jumlah Aparat dan Perangkat Desa						Jumlah Besar Penghasilan Tetap						Jumlah Besar Tunjangan					
	KADES	KEMDES	Kaur/KASI	KADUS	BPD	KADES	SEKDES	Kaur/KASI	KADUS	KADES	SEKDES	Kaur/KASI	KADUS	BPD	MOTIFATOR DESA	LPM	PKK	BPD
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	23	24	25
Itara	9	5	36	31	45	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
n	1	1	4	3	5	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	-	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
ai	1	0	4	3	5	2,000,000	-	1,000,000	1,000,000	750,000	-	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
elatan	1	1	4	4	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
tan	1	0	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
atan	1	0	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
ra	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
igo	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
ar	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
at	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
la	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
lu	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
hun 2007	6	5	24	19	30	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
tara	1	0	4	4	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
mur	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
je	9	8	38	30	45	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
hun 2006	1	1	4	4	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
Timur	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
h	1	0	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
Barat	1	1	4	3	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000
Pengah	1	1	4	4	5	2,000,000	1,400,000	1,000,000	1,000,000	750,000	400,000	200,000	200,000	700,000	400,000	250,000	500,000	200,000

